

**ANALISIS KINERJA DPRD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DALAM FUNGSI LEGISLASI MASA JABATAN
2009-2014**

TESIS

OLEH

**KHAIRUL HUSNI
NPM. 111801014**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**ANALISIS KINERJA DPRD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DALAM FUNGSI LEGISLASI MASA JABATAN
2009-2014**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**KHAIRUL HUSNI
NPM. 111801014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Serdang Bedagai
Dalam Fungsi Legislasi Masa jabatan 2009 - 2014**

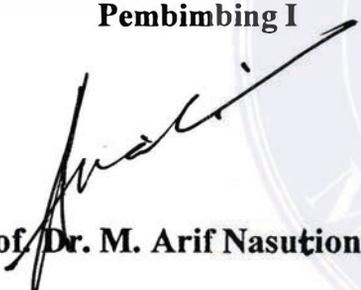
N a m a : Khairul Husni

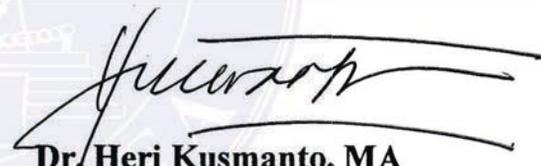
N P M : 111801014

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA


Dr. Heri Kusmanto, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur

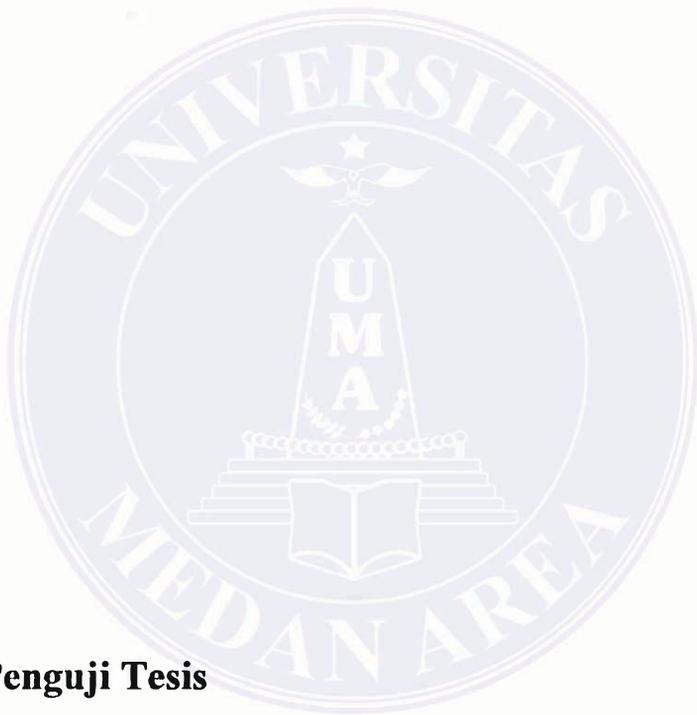

Dr. Warjio, MA


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 28 Maret 2014

N a m a : Khairul Husni

N P M : 111801014



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Ir. Erwin Pane, MS
Sekretaris : Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Pembimbing II : Dr. Heri Kusmanto, MA
Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Maret 2014

Yang menyatakan,



Khairul Husni

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat awal untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan buah manis dari hasil desentralisasi, terbentuk melalui Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004 selanjutnya DPRD untuk pertama kalinya masa jabatan 2004-2009 berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Dan saat ini masuk pada periode ke dua yaitu masa jabatan 2009-2014.

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya harus memilih alternatif yang terbaik bagi masyarakat. Dukungan penuh setwan menjadikan peningkatan kinerja DPRD menjadi lebih baik, ditambah para tenaga ahli dan kelompok pakar dari berbagai disiplin ilmu yang telah teruji pengalamannya.

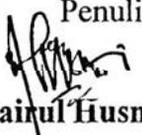
Penulis menyadari bahwa dalam Tesis ini masih sangat banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan waktu yang dimiliki dan belum sepenuhnya penulis mampu menyajikan suatu permasalahan secara keseluruhan mengenai hal-hal yang belum terungkap dengan baik.

Dalam kesempatan ini penulis mempunyai keharusan dan kewajiban moral yang tinggi untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas terselesaikannya proposal tesis ini, terutama kepada mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA, selaku Pembimbing I yang sangat membantu kelancaran dalam penyusunan Proposal Tesis ini.
4. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini;
5. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu selama mengikuti perkuliahan;

Semoga ilmu, dukungan serta dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT, amin..

Medan, Januari 2014

Penulis

Khairul Husni

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Kinerja Lembaga DPRD	13
2.1.1. Pengertian Kinerja	13
2.1.2. Pengukuran Kinerja.....	15
2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja	24
2.2.1 Faktor-faktor internal	25
2.2.2 Faktor-faktor eksternal.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran	39
2.3.1 Kelembagaan (Organisasi).....	40
2.3.2 Sumber Daya Manusia.....	41
2.3.3 Informasi.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Jenis Penelitian	47
3.2. Lokasi Penelitian	48
3.3. Sumber Data	48
3.4. Teknik Pengumpulan Data	49
3.5. Teknik Analisis Data	52

3.6. Variabel Penelitian.....	53
3.7. Defenisi Konsep.....	53
3.8. Defenisi Operasional	54
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	58
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Serdang Bedagai	58
4.2. Gambaran Umum Sekretariat DPRD.....	64
4.3. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Serdang Bedagai	67
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
5.1. Kinerja DPRD Kabupaten Serdang Bedagai	80
5.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja DPRD	90
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
6.1. Kesimpulan	103
6.2. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nuansa era globalisasi tampak menjiwai setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, untuk menampung aspirasi yang jauh berkembang ditegah-tengah masyarakat. Menumpuknya permasalahan pembangunan diberbagai sektor merupakan tugas pertama bagi pemerintahan yang baru terbentuk melalui sidang umum, untuk menuntaskan dan mencari alternatif penyelesaiannya.

Bergulirnya ketidakpuasan daerah terhadap pola pembangunan yang belaku selama pemerintahan Orde Baru, direspon oleh Pemerintahan transisi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang yang telah lama menguatkan dominasi pemerintah dibandingkan Pemerintahan Daerah, sehingga pemberian otonomi kepada daerah tidak dirasakan secara nyata. Hal tersebut menjadi salah satu dasar dibuatnya Undang-Undang yang baru pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah disebut langsung sebagai provinsi, dan kabupaten/kota pada tiap-tiap ayatnya. Menegaskan mengenai pembagian yang bersifat hirarkis ini.

Dalam pelaksanaannya, untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis pada pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga Negara yang memenuhi syarat. Hal tersebutlah yang menjadi

pertimbangan untuk melakukan perubahan selanjutnya sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Diskusi tentang otonomi yang marak pemberitaannya di media massa, telah menjadi semacam tuntutan yang cukup vokal datang dari berbagai daerah. Banyak dikalangan masyarakat menyorot atau mempertahankan tentang peran fungsi atau kinerja DPRD, apakah dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah sebagai wakil rakyat atau yang berkonotasi negatif hanya sebagai simbol / stempel saja. Bentuk otonomi yang disuarakan tersebut menginginkan substansi yang lebih riil, mengandung makna pemberdayaan daerah yang sebenarnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sisi kelemahan di masa Orde Baru dapat juga dilihat dari besarnya kekuasaan pemerintah (*eksekutif*) dibandingkan lembaga perwakilan rakyat (*legislatif*). Sebagai negara demokrasi masing-masing lembaga, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif seharusnya mempunyai kekuasaan mandiri, tanpa intervensi kekuasaan antar lembaga tersebut. Selama Orde baru dapat dikatakan kuatnya dominasi eksekutif terhadap legislatif dan yudikatif sehingga terdapat kerancuan dalam proses pembangunan negara. Istilah kekuasaan otoriter berselubungkan demokrasi dapat diungkapkan melihat fenomena negara Republik Indonesia selama 32 tahun di bawah pemerintahan Orde baru (Yonatan Wiyoso, 2009).

DAFTAR PUSTAKA

- Alex S. Nitisemito, 1996. *Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia)*. Edisi ketiga. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Armida S. Alisjahbana 1998. *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Usaha Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Abad XX*.
- Beetham, Lance, Nurhadiantono Suyanto. 1986. *Birokrasi Kepemimpinan dan Perubahan sosial di Indonesia*, Surakarta : Hapsara.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1980. *Teori dan Strategi Pembangunan*, Jakarta : Gunung Agung.
- Djamin, Awaloedin. 1998. *Penyempurnaan aparatur dan Administrasi Negara Republik*. Jakarta : Yayasan Pembinaan Manajemen - LAN RI.
- Gerald E. Caiden dalam Miftah Thoha, 1991.
- Islamy. Irfan. 1998. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan VII. Jakarta ; Bumi Aksara.
- Jogianto, 1995. *Analisa dan Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur*, Yogyakarta : Andi Offset
- Komaruddin, 1993. *Ensiklopedia Manajemen*, Bandung : Alumni.
- Kendampuly, jay 1998., "Service Quality to Service Loyalty ; A Relationship Which Goes Beyond Customer " *Journal of Total Quality Management*, 9, (6)
- Moenir, H.A.S. 2000, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 1998. *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Usaha Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Abad XXI*. Bandung ; FISIP – UNPAD.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1998. *Etika Administrasi Negara*. Cetakan II. Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada.
- Miftah Thoha, 1991. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Birokrasi*, Yogyakarta : PT. Widya Mandala.

- M. Manullang, 1976. *Manajemen Personalia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- M. Manulang, 1983. *Dasar-dasar Manajemen*, Catatan X, Penerbit Ghalia Indonesia.
- M. Manullang, 1982. *Manajemen Personalia*, Cetakan VII, Penerbit Ghalia Indonesia 1982.
- Masri Singarimbun dan Soffian Effendi, 1989. *Metode Penelitian Survey*, LP3E.
- Menteri PAN, 2003. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik* . Jakarta.
- Menteri PAN 2005. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/PAN/2/2005 Tentang *Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Osborne, David and Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government ; How The Enter Preneurial Spirit is Transforming the Public Sektor*. New York ; Penguin Book.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Masa Jabatan 2009-2014.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1998. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta ; LP3ES.
- Steers, Richard M. 1985. *Evektivitas Organisasi*. Diterjemahkan oleh Magdalena Jamin. Jakarta; erlangga.
- Sugiyono. 1998. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung ; Alfabeta.
- Sutrisno Hadi, M.R, 1975. *Metodelogi Riset jilid I*, Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada Universitas.
- Syamsul Alam Mkka, dkk, 1988, *Sistem Akuntansi, Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi Depdikbud 1990/1991*, Jakarta: P2A

- Suwandi, Made. 2002, *Pokok-pokok Pikiran Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia*, Forum Kebijakan, Program MAP-UGM, 19 April 2002, Yogyakarta.
- Suryawikarta, Bay. 1998. *Tanggungjawab Administrasi Negara Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan melalui Penyempurnaan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia* Bandung ; LAN-RI Perwakilan Jawa Barat.
- Sudarsono Hardjosoekarto, dkk, 1998. *Strategi Pelayanan Prima*, Jakarta : LAN
- Suwandi, Made. 2002, *Pokok-pokok Pikiran Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia*, Forum Kebijakan, Program MAP-UGM, 19 April 2002, Yogyakarta
- Toha, Miftah. 1997. *Perseptif Perilaku Birokrasi*. Cetakan II. Jakarta ; CV. Rajawali.
- The Liang Gie, 1982. *Cara Bekerja Efisien*, Yogyakarta : Super Sukses. Penghargaan.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Winarno, Budi, 2004, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Jakarta : Media Pressindo.
- Wasistiono Sadu dan Wiyoso Yonatan, 2009. *Meningkatkan Kinerja DPRD*, Bandung: Fokus Media.
- Zeithmal, Valerie a and Bitner, May Jo. 1996. *Service Marketing*. Mc Grow Hill International Editions.
- Zeithmal, Valerie, Barry, Leonard I., and Parasuraman A. 1996., *The Behavioral Consequences of service Quality* "Journal of Marketing" 60 (31-46).